

PENGALAMAN MILITER BURMA : SEBUAH ANALISIS HISTORIS – POLITIS¹

Ita Mutiara Dewi²

Abstrak

Sejak dulu, Burma dikenal sebagai negara yang pemerintahannya dihegemoni oleh kelompok militer. Hampir semua jabatan penting dalam pemerintahan diduduki oleh orang-orang berbasis militer. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap situasi politik atau pemerintahan Burma yang dikatakan sebagai pemerintahan atau rezim yang otoriter dan totaliter. Segala urusan ditentukan oleh negara dan rakyat harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemimpin tertinggi di negara tersebut, tanpa adanya mekanisme koreksi terhadap kebijakan pemimpin atau penguasa. Meskipun *National League for Democracy*, partai politik yang dipimpin Aung San Suu Kyi, memenangkan 392 kursi dari 485 kursi yang ada di legislatif, keberadaannya tidak dapat mengalahkan rezim militer di Burma, meskipun sebagian besar rakyat mendukungnya.

Memang, di zaman sekarang ini situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Burma merupakan sesuatu yang cukup langka dijumpai di dunia, karena negara-negara pasca PD I mulai bergerak menuju ke arah tipologi demokrasi, meskipun demokrasi sendiri sebenarnya tidak jelas konsep idealnya apakah mengharapkan negara seperti AS yang mulai menunjukkan kelemahannya misalnya kerusakan masyarakat dimana angka aborsi, anak yang tidak jelas orang tuanya jumlahnya cukup banyak. AS pun gemar melakukan intervensi terhadap negara lain dan melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak manusia seperti kasus penyerangan terhadap Iraq dan Afganishtan. Tulisan ini tidak membahas bagaimana konsep pemerintahan dan negara yang ideal tetapi sekedar memaparkan bagaimana dominasi militer di Burma.

Keywords: militer, Burma, pretorianisme

I. PENDAHULUAN

Kehidupan sosial politik Burma seperti yang sudah ada sampai sekarang ini tidak terlepas dari sisi historisnya. Dari bukti-bukti yang tersedia, pemerintahan sipil Burma tidak pernah bertahan lama, tidak seperti di Thailand yang pemerintahan sipilnya lebih bertahan lama. Walaupun sering terjadi kudeta di Thailand, tetapi setelah kudeta, pemerintahan diserahkan kepada kaum sipil.

¹ Artikel di muat di Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah ISTORIA Vol. 1 No. 1/2005, Jurusan Pendidikan Sejarah FISE UNY

² Staff Pengajar Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNY

Sedangkan di Burma, pemerintahan lebih menyukai menggulingkan rezim sipil untuk diganti dengan pemerintahan yang militeristik.

Suatu pemerintahan yang militeristik dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, bukan merupakan solusi yang baik terhadap pemerintahan. Hal ini dapat ditinjau dari pengalaman Burma pasca tahun 1962, setelah Jendral Ne Win melakukan kudeta terhadap pemerintahan U Nu.

Militer Burma merupakan tentara yang berbasis *National Liberation*, maksudnya dulu tentara atau kelompok militer memiliki orientasi untuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Menurut data di tahun 1962 sekitar 149.000 dari 20.457.000 jiwa penduduk berprofesi sebagai tentara, sedangkan yang menjadi pejabat yaitu sekitar 5000 orang. Alokasi pengeluaran untuk militer pun cukup besar yaitu 31 %. Hal ini menjadi fenomena yang menarik. Kemungkinan kegiatan di bidang militer berkurang, dengan banyaknya tentara, sehingga akhirnya tentara terjun ke kancah politik.

II. SEJARAH AWAL REZIM MILITER BURMA

Burma mengalami pemerintahan sipil sejak kemerdekaannya di tahun 1948-1958 dan dari 1960-1962, sehingga selain dekade tersebut pemerintahan dikuasai oleh kubu militer. Sejarah militer di Burma dan Indonesia, sebenarnya sama-sama dapat diawali dari pendudukan Jepang terhadap kedua wilayah tersebut. Pelatihan militer yang diterima oleh pejabat dan masyarakat dan pengalaman yang dilaluinya telah menyisakan kesan yang mendalam bagi perkembangan militer di kedua negara seperti yang ada saat ini.

Pada awal Perang Dunia II, Jepang mendapat pengakuan sebagai negara pelopor pembebasan di kawasan Asia Tenggara. Hal ini yang mendorong Aung

San bersama rekan-rekannya bepergian ke Jepang di tahun 1939 dan berjumpa dengan Kolonel Suzuki. Kolonel Suzuki berusaha mengambil alih kekuasaan Inggris di Burma. Pada tahun 1941, Aung San kembali ke Burma dan merekrut beberapa *thakins* untuk mendapatkan pelatihan militer dari Jepang. Jepang pun mendukung pembentukan *Burma Independence Army* (BIA) di Thailand, yang cukup mendukung kekuatan Jepang di Burma.

Pada awalnya BIA diterima dengan baik di seluruh wilayah Burma. Pemimpin BIA mengembangkan kontak dengan *thakins* lokal di daerah pedesaan dan dalam waktu singkat BIA menjadi kekuatan yang solid dan populer di masyarakat. Meskipun tidak memainkan peranan penting dalam kampanye militer, sering dikatakan bahwa BIA membantu kekuatan Jepang di Burma.³ Bagaimanapun kekuasaan militer Jepang dikonsolidasikan terhadap pendudukan Jepang di Burma, tetapi akhirnya militer Jepang berbalik menyerang BIA, terutama karena mereka merasa tidak nyaman tentang naiknya popularitas BIA.

Pada tahun 1942, administrasi militer Jepang memerintahkan pembubaran BIA. Pembubaran BIA tidak berarti merupakan penurunan pengaruh pemimpin BIA. Mereka tetap berlanjut menarik perhatian rakyat. Baik tindakan represif rezim militer Jepang maupun reformasi damai tidak dapat mencegah munculnya gerakan anti-Jepang di seluruh wilayah.⁴

Sebelum tahun 1962, pemegang kunci utama pemerintahan adalah Perdana Menteri U Nu yang cukup lama menduduki jabatan tersebut (sejak kemerdekaan Burma 4 Januari 1948). Kemudian pada tahun 1958, kelompok militer yang

³ Dorothy Guyot, *The Burma Independence Army: A Political Movement in Military Garb* dalam Verinder Grover Ed. *Politics and Government of Asian Countries, Series 10 : Myanmar*. New Delhi: Deep and Deep Publications Pvt. Ltd., 2000, hal 169

⁴ Grover, *ibid*

dikuasai oleh Jenderal Ne Win melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh krisis politik yang meningkat dalam pemerintahan U Nu akibat perpecahan dalam partai *Anti-Facist People's Freedom League* (AFPL). Demi menegakkan demokrasi dan mengembalikan pemerintahan ke pihak sipil, Jenderal Ne Win mengadakan pemilu di tahun 1960. Pemenang dalam pemilu adalah Partai Persatuan yang dipimpin U Nu, sehingga ia terpilih lagi menjadi Perdana Menteri. Tetapi pemerintahan U Nu digulingkan kembali pada tanggal 2 Maret 1962. Jadi dalam hal ini terjadi perebutan kekuasaan antara politisi sipil dan militer. Yang akhirnya menyebabkan intervensi militer dalam politik bahkan dapat dikatakan sebagai dominasi militer dalam politik.

Penyebab perebutan kekuasaan ataupun intervensi militer terhadap pemerintahan di Burma saat itu bukan semata karena krisis politik, tetapi ada beberapa sebab pokok:⁵

Pertama, ketidakmampuan politisi-politisi sipil untuk menciptakan suatu politik yang sehat dan stabil.

Kedua, bahaya keamanan yang selalu mengancam Burma yang tidak dapat diatasi dengan baik oleh U Nu. Seperti pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok etnis Karen dan Shan dan sisa tentara Guo Min Dang yang merembes ke sana pasca Perang Dunia II.

Ketiga, diri pribadi U Nu sebagai pemimpin dan politisi. Walaupun U Nu terlihat kharismatik, tetapi kurang tegas dalam mengambil keputusan. Padahal keputusan itu terkadang harus cepat diambil apabila keadaannya sudah mendesak.

⁵ Alfian, *Militer dan Politik: Pengalaman Beberapa Negara*, Jakarta: LIPI, 1970, hal. 6 - 7

Setelah kudeta ini Burma menjalankan pemerintahan yang militeristik—di bawah rezim militer—yang didukung oleh Dewan Revolusi. Pemerintahan itu bersifat sosialis sehingga sering disebutkan dalam berbagai wacana tentang *The Burmese Way to Socialism*. Tujuan dari pemerintahan militeristik ini yaitu⁶:

- a. Reformasi ekonomi
- b. Pembatasan pengaruh luar negeri dari berbagai dimensi baik ekonomi, politik maupun sosial.
- c. Perubahan nilai dan perilaku rakyat, sehingga kepemimpinan yang baru bisa menimbulkan revolusi.
- d. Penyatuan manusia Burma yang multi-etnis menjadi bangsa yang satu.

Dalam prakteknya dalam memmanifestasikan tujuan tersebut, ternyata rezim militer gagal dalam menjalankan pemerintahan maupun membuat kebijakan yang berdampak baik bagi rakyat. Buktinya, produksi padi semakin menurun sebanyak 5,3% pada tahun 1965 – 1966 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemberontakan pun masih sering dijumpai dimana-mana. Selain itu, kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat. Sehingga mitos kegagalan politisi sipil terhadap kehidupan rakyat pun berkurang. Jadi politisi militer justru menyebabkan kehidupan masyarakat semakin memburuk.

Dominasi militer yang kuat pun terlihat jelas dalam perjalanan sejarah Burma selanjutnya. Pada tahun 1963 dan 1964, *Revolutionary Council* melakukan nasionalisasi terhadap semua industri, bisnis besar dan toko-toko. Sebagai konsekuensinya, asosiasi bisnis runtuh. Sekolah, rumah sakit, dan bioskop juga dinasionalisasi, asosiasi perpustakaan ditutup dan debat publik ditiadakan lagi. Rezim mengembangkan penelitian yang cermat untuk mengawasi seluruh

⁶ Edward Feit, *The Armed Bureaucrats*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1973, hal. 99

penerbitan mencakup desain sampul majalah dan kalender. Pada tahun 1969, seluruh surat kabar swasta dinasionalisasi atau digantikan dengan surat kabar yang dikontrol pemerintah.⁷

Pada tahun 1964, *National Solidarity Act* menghapus semua partai politik. Hanya satu partai saja yaitu *Burma Socialist Program Party* (BSPP) yang diperbolehkan untuk merekrut anggota. bahkan pegawai negeri juga diminta untuk berpartisipasi dan mendukung partai tersebut. Pada tahun 1972, *Revolutionary Council* memegang referendum konstitusi baru yang berdampak dimana dari tahun 1974 dan 1988, Burma berada dibawah satu partai saja yang dipimpin Jenderal Ne Win yang didukung oleh personel pejabat militer. Pada pertengahan 1970-an, kelompok mahasiswa dan pelajar, pekerja pemerintah yang mengalami frustrasi akibat penurunan standar hidup melakukan protes terhadap pemerintah yang akhirnya menyebabkan pemerintah menggunakan kekuatan militernya untuk mengatasi gelombang massa ini.⁸

Peranan militer dalam politik Burma juga terlihat dari adanya *State Development and Peace Council* (SDPC) yang dibentuk sejak tahun 1997, sebelumnya SDPC bernama *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). SLORC pada awalnya didirikan untuk memperbaiki kondisi politik di Burma.⁹ Dengan sebutan apapun, lembaga yang merupakan kaki tangan rezim militer tersebut sampai sekarang belum menunjukkan peluang besar menuju rezim yang

⁷ U Thaug, *A Journalist, a General and an Army in Myanmar* (Bangkok: White Lotus 1995), hal. 48 dalam *Myanmar: The Role of Civil Society*, http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400505_06122001-1.pdf, hal 4

⁸ *ibid*

⁹ *Burma/Myanmar: How Strong is The Military Regime*, http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400302_21122000-1.pdf, hal 2-4

demokratis seperti kasus kemenangan NLD dalam pemilu 1990 yang diabaikan begitu saja. Ini berarti pihak militer ingin tetap mempertahankan hegemoninya.

Keterlibatan militer dalam kehidupan politik atau pemerintahan di atas memang sesuai dengan teori bahwa intervensi itu disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Anggapan bahwa militer itu mengemban tugas suci, untuk menyelamatkan negara. Memang Burma perlu diselamatkan karena berbagai ancaman yang ada tetapi apakah ancaman itu bisa diselesaikan dengan pendekatan militer yang lebih dominan akan tindakan kekerasannya.
2. Kepentingan sektoral atau kelompok. Burma memiliki ideologi kepentingan nasional yang disebabkan oleh 3 hal yaitu *non-disintegration of the Union*, *non-disintegration of National Solidarity*, *perpetuation of national sovereignty*. Kepentingan nasional itu entah apakah benar-benar untuk kepentingan nasional atau jalan untuk melancarkan kepentingan kelompok militer.
3. Tentara merasa lebih penting (*self important motive*).
4. Perasaan harga diri militer yang kuat berkaitan dengan masalah *defense*.
5. Perasaan superioritas militer atas sipil. Selama ini kaum sipil dianggap tidak efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan, padahal rezim sipil belum benar-benar cukup lama dalam menduduki pemerintahan. Sehingga militer sendirilah yang merasa sipil tidak tahu apa-apa sebelum ada bukti yang cukup.

III. HUBUNGAN SIPIL – MILITER DI BURMA

Hubungan sipil-militer suatu negara secara umum menurut Huntington dapat dikategorikan dalam 5 pola¹⁰:

1. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang besar, profesionalisme militer yang rendah. Hal ini sering dijumpai dalam negara primitif, seperti Jerman saat Perang Dunia I maupun AS saat Perang Dunia II
2. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer yang rendah. Hal ini sering dijumpai dalam negara totaliter, misalnya Jerman di Perang Dunia II.
3. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer yang besar. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus AS di awal kemunculan profesionalisme militer pasca Perang Sipil sampai PD II.
4. Ideologi pro militer, kekuatan militer yang besar, profesionalisme militer yang tinggi. Contoh: Prussia dan Jerman dalam epos Bismarckian-Molkean (1860 – 1890)
5. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer yang tinggi. Contoh: Inggris di abad ke-20.

Dari kelima kategori diatas, yang tepat untuk kondisi hubungan sipil-militer saat ini adalah no. 1 karena sampai saat ini kekuatan militer memang kuat dalam mendominasi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Tetapi profesionalisme militer rendah karena terbuai kehidupan politik. Sedangkan ideologi Burma jika

¹⁰ Huntington, Samuel P. *The Soldier and State*, Cambridge:Harverd University Press, 1957, hal 96 Dalam hal ini, ideologi tidak diartikan secara mendalam sebagai pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang hakekat kehidupan yang menghasilkan adanya sistem kehidupan. Ideologi menurut Huntington di sini berarti sebatas ajaran, perspektif atau pandangan saja.

ditinjau dari sisi rakyat memang anti militer, tetapi militer sendiri tentunya tidak anti-militer.

Dari perspektif yang lain, Burma dapat dikatakan sebagai negara yang menganut pretorianisme jika dilihat dari format pemerintahan dan hubungan sipil-militernya. Pretorianisme dapat dilihat dari fenomena dimana militer menjadi aktor utama yang dominan menggunakan kekerasan atau setidaknya mengancam menggunakan kekerasan dan kekuasaan yang dimiliki. Menurut Frederick Mundell Watkins dalam *Encyclopedia of The Social Sciences* edisi tahun 1933, pretorianisme sendiri mengacu pada suatu situasi dimana militer dalam suatu masyarakat tertentu melaksanakan kekuasaan politik yang otonom di dalam masyarakat tersebut berkat penggunaan kekuatan aktual atau ancaman penggunaan kekuatan¹¹. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pretorianisme merupakan intervensi militer dalam politik maupun dunia sipil lainnya.

Pretorianisme sendiri menurut Amos Perlmutter masih dibagi menjadi beberapa tipe yaitu pretorianisme historis dan pretorianisme tentara modern. Pretorianisme tentara modern dibagi menjadi 3 sub bentuk yaitu otokrasi, oligarki dan otoriter. Pretorianisme otokrasi merupakan bentuk tirani militer sederhana dimana pemerintahan dikuasai oleh satu orang. Pretorianisme oligarkhi mengacu pada pemerintahan oleh beberapa orang yang biasanya merupakan kelompok elit. Kursi-kursi utama dalam badan eksekutif diduduki oleh perwira militer. Pretorianisme otoriter ditandai dengan adanya pemerintahan fusi sipil-militer. Jadi, rezim militer yang otoriter hampir seluruhnya terdiri dari tentara, birokrat, manajer dan teknokrat yang membatasi dukungan dan mobilisasi politik.

Mayoritas badan eksekutif militer dalam rezim otoriter kemungkinan terdiri dari orang-orang militer atau pejabat sipil dan kepala pemerintahan belum tentu perwira militer.

Dari berbagai bentuk pretorianisme yang ada, Burma dapat dikategorikan dalam pretorianisme oligarki, karena sampai sekarang ini rezim dikuasai oleh kelompok militer meskipun dalam parlemen sebagian besar diduduki politisi sipil. Selain itu pembuat keputusan utama adalah di pihak 5 pejabat utama di pemerintahan yang merupakan kelompok militer yang sekarang diketuai oleh Jenderal Than Shwe. Sebenarnya, Burma pun mendekati pretorianisme otoriter, hanya saja, karena peranan militer yang lebih dominan dalam pemerintahan dibandingkan sipil maka tidak sesuai bila dikatakan sebagai pretorianisme otoriter.

Salah satu sisi hubungan sipil-militer yang menarik untuk disoroti dalam pemerintahan adalah tentang sistem kepartaian dalam kerangka hubungannya dengan tentara. Yang dimaksud di sini yaitu partai sering digunakan oleh kelompok militer dalam mempertahankan dan memperkuat pengaruh serta hegemoninya terhadap rakyat. Saat ini di Burma terdapat beberapa partai yaitu *National League for Democracy* atau NLD (diketuai oleh Aung Shwe, sekretaris umum yaitu Aung San Suu Kyi); *National Unity Party* atau NUP (diketuai Tha Kyaw); *Shan Nationalities League for Democracy* atau SNLD [U Khun Tun Oo]; dan beberapa partai kecil. Jika pada era sebelumnya— pemerintahan Jenderal Ne Win—yang merupakan partai pemerintah adalah *Burma Socialist Programme Party* (BSPP), partai tersebut merupakan satu-satunya partai yang mendominasi pemerintahan saat itu. Sedangkan sekarang, dimana ada kebebasan untuk

¹¹ Amos Perlmutter, *Militer dan Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985 hal. 142

mendirikan partai, maka partai NUP yang mendukung rezim (pro rezim), sehingga dapat dikatakan bahwa partai itulah yang merupakan sarana rezim untuk memperkuat kedudukannya. Keterlibatan militer dalam partai politik dapat juga dilihat dari negara seperti Cina, dimana Partai Komunis Cina sampai sekarang masih eksis dan besar peranannya. Memang antara kedua negara itu memiliki persamaan seperti sistem sosialisme yang berpengaruh terhadap kehidupan politik yang tidak memisahkan pemerintahan, kehidupan militer dan garis kepartaian.

Selain menggunakan partai untuk memperkuat statusnya, rezim militer yang sering disebut sebagai *Security Development and Peace Council (SDPC)* juga menggunakan organisasi sosial politik untuk meraih massa sipil yaitu *Union Solidarity and Development Association* atau USDA (sekretaris umumnya yaitu Than Aung). Selama ini, USDA memiliki fungsi untuk memobilisasi massa dan sekarang ini memiliki anggota sekitar 11 juta (35% dari jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas). USDA merupakan kubu sipil dalam pemerintahan meskipun tidak berwujud partai politik. Jadi USDA ini semacam Golkar di Indonesia di zaman pemerintahan Suharto. Ketua USDA tersebut “tidak lain dan tidak bukan” pemimpin SDPC, Jenderal Than Shwe dan sekretaris umumnya yaitu Than Aung. Sehingga peranan Jenderal Than Shwe secara personal dalam pemerintahan Burma sangatlah besar karena menduduki beberapa jabatan sekaligus. USDA merupakan senjata ampuh untuk melawan NLD, karena keanggotaannya direkrut dari semua pegawai pemerintah.

Dominasi militer dalam pemerintahan Burma ini yang bersifat konstan dan tetap itu kemungkinan cukup jarang dijumpai di negara dunia ketiga. Padahal di negara dunia ketiga sering bertendensi pada dominasi militer yang tidak tetap atau

mengalami pasang surut namun tetap terjadi pergeseran meskipun tidak bersifat radikal. Militer Burma sangat sulit untuk digeser oleh politisi sipil. Bahkan politisi sipil semacam Aung San Suu Kyi yang menyuarakan demokrasi justru menjadi tahanan luar di negara tersebut, saat mencoba mengurangi pengaruh rezim militer. Memang kekuatan sipil tidak berkuat di negara tersebut. Hal ini dapat dilihat pula dari zaman U Nu yang dikalahkan oleh Ne Win. Jadi dalam rivalitas sipil-militer, selalu dimenangkan oleh pihak militer. Hal ini memang cukup unik dialami oleh suatu negara, karena mengapa masyarakat sipil sama sekali tidak terlihat pengaruhnya dalam mengartikulasikan keinginan dan kepentingannya. Semua ini adalah disebabkan oleh berbagai sektor kehidupan yang ada selalu diatur dan dihegemoni pemerintah. Rakyat sipil mau tidak mau harus menurut pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau rezim militer.

Pemerintah militer (SDPC) pun berusaha untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil melalui berbagai sektor seperti pendidikan, budaya, komunikasi, dll. Dalam bidang teknologi komunikasi misalnya, di tahun 2001, hanya ada 11 saluran telepon untuk 2000 orang penduduk, sedangkan biaya telepon nirkabel pun sangat mahal sehingga jarang dimiliki. Dari hal ini dapat dilihat bahwa menjadi masyarakat sipil di Burma itu kurang sejahtera. Walaupun masyarakat sipil melakukan protes ataupun unjuk rasa terhadap pemerintah, pemerintah militer menghadapinya dengan jalan kekerasan. Seperti pada kasus di tahun 1989 dimana aktivis mahasiswa dan *Democratic Party for a New Society* (DPNS) yang melakukan kampanye demokrasi kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Begitu pula dengan Aung San Suu Kyi yang diberi status tahanan rumah sejak 1989.

IV. KEKUATAN MILITER BURMA DI ERA KONTEMPORER

Sampai saat ini, kekuatan militer di Burma tentu saja masih sangat kuat, walaupun disangsikan apakah kelompok militer itu disukai oleh rakyat. Di dalam benak pemerintah militer yang penting adalah supaya mereka bisa tetap eksis di pemerintahan dan justru tidak memberikan peluang terhadap sipil dalam pemerintahan, dengan dalih pengalaman pemerintahan sipil di tahun-tahun sebelumnya yang gagal dalam memecahkan persoalan. Jadi masyarakat pun terkadang terpaksa memasuki kancah militer agar dapat mendapatkan posisi yang strategis di dalam berbagai sektor kehidupan. Tentu saja kuantitas personel militer menjadi bertambah tiap tahun.

Menurut data yang tersedia, jumlah personel militer di tahun 1998 yaitu sekitar 450.000 jiwa sehingga 2 kali lebih besar dibandingkan tahun 1988. Jadi jumlah *Tatamadaw*—sebutan tentara Burma—merupakan jumlah yang menduduki urutan ke-2 terbesar di Asia Tenggara setelah Vietnam. Di tahun 2001 ini jumlah tentara atau personel militer meningkat menjadi sekitar 550.000 jiwa yang terdiri dari 470,667 personel laki-laki dan 479,691 personel perempuan¹². Jumlah personel militer yang terus meningkat kemungkinan juga disebabkan oleh anggaran pemerintah di bidang militer yang cukup lumayan yaitu sekitar US \$ 39 atau sekitar 2,1% dari GNP. Dengan anggaran militer tersebut maka kemungkinan kehidupan militer bisa lebih menyenangkan dibandingkan kehidupan sipil, sehingga tiap tahun selalu terjadi peningkatan jumlah.

Kekuatan militer dalam rezim (SDPC) ini dapat dilihat pula dari tokoh-tokoh utama yang memainkan peranan di sana. Tokoh-tokoh tersebut yaitu

Jenderal Senior Than Shwe sebagai Ketua SDPC, Panglima Besar *Tatmadaw*, Kepala Negara, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Dengan jabatan yang bermacam-macam dan *overlapping* ini kemungkinan menyebabkan pembuatan keputusan menjadi jauh menuju demokrasi atau bahkan sepihak saja. Hal ini disebabkan karena kepentingan jabatan satu mempengaruhi jabatan lainnya. Jadi peran atau tugas-tugas menjadi berjalan kurang maksimal.

Selain itu, Jenderal Maung Aye menjadi Wakil SDPC dan Panglima Besar Angkatan Darat, Letnan Jenderal Khin Nyunt sebagai sekretaris 1 SDPC, Letnan Jenderal Tin Oo sebagai sekretaris 2 SDPC, Letnan Jenderal Win Myint sebagai sekretaris 3 SDPC, Laksamana Muda Kyi Min sebagai Panglima Besar Angkatan Laut dan Brigadir Jenderal Kyaw Than sebagai Panglima Besar Angkatan Udara. Jadi semua tokoh penting dalam pemerintahan ini berasal dari militer. Walaupun begitu, tetap terjadi rivalitas dalam rezim terutama untuk memperoleh kekuasaan yang lebih luas atau lebih tinggi. Rivalitas itu terjadi antara 2 faksi yang dimotori Khin Nyunt (berbasis intelijen militer) dan Maung Aye (berlatar belakang pertempuran dan perang psikologis). Tetapi, adanya perpecahan ke dalam faksi ini tidak menyebabkan rezim militer semakin melemah. Rezim militer tetap baik-baik saja, karena diimbangi oleh peran Than Shwe sebagai moderator antar faksi dan hubungan spesial Khin Nyun sebagai anak didik Ne Win.¹³

Meninjau kekuatan militer Burma dalam realitasnya baik dalam maupun luar rezim memang sulit digoyahkan. Dengan semakin meningkatnya jumlah personel militer tiap tahun maka kekuatan luar rezim semakin kuat. Dengan

¹² diakses dari *CIA -- The World Factbook*,
<http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bm.html>.

¹³ *Burma/Myanmar: How Strong is The Military Regime*, http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400302_21122000-1.pdf, hal 5 -6

adanya tokoh-tokoh dalam rezim yang kuat pun menyebabkan pemerintahan militer bertahan lama. Kebijakan-kebijakan rezim yang ketat pun menyebabkan kekuatan militer semakin kuat. Hal ini dapat diamati dari contoh *National Convention* 9 Januari 1993 yang menjelaskan tentang kontrol militer terhadap dewan eksekutif dan legislatif yaitu dengan mendudukkan 25% pejabat *Tatmadaw* dalam parlemen—110 dari 440 kursi di Majelis Rendah (*Pyithu Hluttaw*) dan 56 dari 224 kursi di Majelis Tinggi. Jika kursi-kursi penting dikuasai terus oleh militer, otomatis kekuatan militer tetap terjaga. Hanya saja entah semakin menguat atau melemah tergantung pada parameter apa yang harus digunakan.

Selain pemerintah yang didominasi militer, banyak kelompok paramiliter yang berwujud tentara etnis, diantaranya

V. KESIMPULAN

Kunci kesuksesan peran rezim militer di Burma adalah dengan membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Jadi, apapun dilakukan untuk menghegemoni masyarakat meskipun yang harus dilakukan adalah pendekatan militeristik yang bertendensi berjalan di rel kekerasan. Fenomena inilah yang sering didefinisikan sebagai pretorianisme, dimana aktor politik utama berasal dari militer dan sering menggunakan tindakan militeristik dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini berimplikasi pada sedikitnya peluang untuk memiliterkan militer Burma atau membentuk suatu tentara yang profesional, karena tentara lebih banyak menduduki jabatan militer yang mungkin sebenarnya perlu disangsikan kapabilitasnya.

Sebagai negara yang pretorian, maka militerisasi sipil juga dapat terjadi apabila di negara itu diadakan wajib militer. Tetapi, jika melihat kenyataannya rakyat sipil Burma seakan hanya menjadi masyarakat sipil saja tanpa harus menjadi personel militer. Selain itu intervensi sipil dalam kubu militer pun sangat langka atau bahkan tidak pernah terjadi. Sehingga kasus Indonesia dimana terjadi militerisasi sipil, kurang dijumpai di Burma.

Berkaitan dengan peranan militer yang kuat dan sipil yang lemah, untuk mengurangi pengaruh militer di sektor kehidupan apapun, sebaiknya masyarakat sipil harus berjuang lebih gigih. Misalnya, dengan memasuki kancah militer tetapi tetap memiliki wawasan sipil dan berusaha memperjuangkan hak-hak sipil. Hal ini cukup efektif, karena jika menduduki kursi militer, maka akan mengetahui kekuatan dan kelemahan militer sehingga dapat dicari sisi-sisi untuk mengurangi pengaruh militer di dalam pemerintahan. Tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena apabila tidak terlihat pro rezim atau justru menentang rezim, maka posisi akan tidak bisa bertahan lama dan kita dapat segera disingkirkan dari ezim atau bahkan mendapat sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zakaria Haji dan Harold Crouch. 1985. *Military-Civilian Relations in South East Asia*. Oxford: Oxford University Press

Alfian. 1970. *Militer dan Politik: Pengalaman Beberapa Negara*. Jakarta: LIPI.

Feit, Erdward. 1973. *The Armed Bureaucrats*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Huntington, Samuel P. 1957. *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil Military Relations*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press

Janowitz, Morris. 1977. *Military Institution and Coercion in The Developing Nations*. Chicago: University of Chicago.

Perlmutter, Amos. 1985. *Militer dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

Selochan, Viberto. 1991. *The Military, The State and Development in Asia and The Pasific*. Colorado: Westview Press Inc.

Verinder Grover Ed. *Politic and Government of Asian Countries, Series 10 : Myanmar*. New Delhi: Deep and Deep Publications Pvt. Ltd., 2000

Burma/Myanmar: How Strong is The Military Regime, http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400302_21122000-1.pdf

CIA -- The World Factbook, <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bm.html>

Myanmar: The Military Regime's View of the World, http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400505_07122001-1.pdf

Myanmar: The Role of Civil Society, http://www.intl-crisis-group.org/projects/asia/burma_myanmar/reports/A400505_06122001-1.pdf